

TAJUK RENCANA

Belum Saatnya 'Santuy' Hadapi Wabah Covid-19

BERDASAR Keputusan Menteri Pendidikan, hari ini 13 Juli adalah mulai dilaksanakan tahun ajaran baru 2020/2021. Dalam keputusannya Menteri menegaskan hanya kabupaten dalam zona hijau saja yang diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka. Itupun dengan menggunakan protokol kesehatan lengkap. Bahkan jika orangtua merasa tidak aman dan nyaman bisa melakukan pembelajaran dari rumah.

Kabupaten dan kota di DIY secara keseluruhan menurut Sekda DIY K Baskara Aji masuk dalam zona kuning dengan Kulonprogo terendah dan Sleman tertinggi. Maka pembelajaran dalam jaringan (daring) tetap diberlakukan. Sedangkan di Jawa Tengah, dari 35 kabupaten/kota hanya 8 wilayah yang masuk kategori zona hijau : Kabupaten Blora, Kendal, Kota Surakarta, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Brebes dan Tegal. (jatengprov.go.id, 8/7). Namun Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid Nasional Dewi Nri Aisyah mengoreksi. Dengan melihat dinamikanya, tinggal 4 kabupaten masuk kategori zona hijau : Banjarnegara, Klaten, Brebes, dan Purworejo (covid19.go.id, 9/7).

Membaca dinamika wabah Covid-19 di DIY dan Jawa Tengah dan mengingat kepentingan terbaik untuk keselamatan anak adalah yang utama, keputusan Mendikbud menjadi tepat. Daerah juga perlu cermat. Artinya, sekalipun masuk zona hijau, tidak perlu terburu untuk membuka proses belajar tatap muka. Sekalipun hasil penelitian angket Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Istiyarti (25/7) menarik untuk disimak. Karena dalam angket yang disebar melalui akun facebook dan diikuti 9.643 siswa, 18.112 guru dan 195.559 orang tua, terdapat hasil yang sangat bertolak belakang. Mayoritas siswa setuju masuk sekolah kembali namun mayoritas

orang tua justru menolak.

Bisa dimengerti keinginan anak kembali ke sekolah. Masih teragapnya sebagian guru dengan pembelajaran daring membuat siswa bosan. Keluhan bila materi pembelajaran terasa garing karena hanya sekedar memindahkan materi tatap muka melalui virtual, paling sering terdengar. Selain yang paling 'menyiksa' anak adalah banyaknya tugas harus diselesaikan.

Secara nasional angka kasus baru mencapai 1.671 per 11 Juli 2020. Di DIY dinamikanya juga masih berlangsung terus. Bahkan data Jumat-Sabtu (KR, 11-12/7) menunjukkan bila Orang dalam Pemantauan (ODP) Jemat di angka 7.918, Sabtu 7.941. Sementara Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 1.977 menjadi 1.990, positif 364 menjadi 370.

Harus dipahami, realita inilah yang membuat kekhawatiran orang tua yang menolak kembali pembelajaran tatap muka. Jangan 'terkecoh' dengan istilah *new normal* yang menganggap segala sesuatunya sudah normal. Tampaknya, kondisi yang terjadi semakin tidak terkendali. Tata kenormalan baru yang menghindari kerumunan, mengenakan masker, menjaga jarak bahkan cuci tangan dengan benar pun, kerap diabaikan.

Setelah membuat keputusan tepat, untuk masa depan anak didik dan pendidikan, Mendikbud harus segera membuat atau melakukan rekayasa kurikulum agar sesuai dengan metode pembelajaran daring. Kalau tidak, dari kurikulum yang ada Mendikbud perlu memberikan 'kemerdekaan' pada guru untuk melakukan modifikasi atau kreativitas mengajar secara daring.

Ini bukan hal mudah bagi guru ataupun sekolah. Namun inilah tantangan bagi sekolah dan guru. Memang belum saatnya kita semua bersikap *santuy* menghadapi wabah Covid-19. ***-o

Hari Malala, Hari Pendidikan Perempuan

Cahyaningsih

Freire sejak 1970 seolah menjadi lagu kritik yang indah untuk didengarkan namun sulit diwujudkan. Politik pendidikan, kebudayaan dan kebebasan yang seharusnya sudah meluluskan masyarakat dunia dari ujian diskriminasi jender dalam pendidikan. Nyatanya, stereotipe jender masih menjadi PR yang menggurita.

Kesetaraan jender menjadi perhatian utama dalam Konvensi PBB mengenai

karirnya, tidak lagi menjadi subordinasi laki-laki dan termarginalisasi. Namun apakah dengan payung hukum terhadap diskriminasi perempuan saja sudah cukup? Tentu saja tidak.

Di Indonesia

Perjuangan Malala dalam dunia pendidikan di Pakistan tentu luar biasa. Namun tidak *apple to apple* ketika kita membandingkan perjuangan Malala dengan kesempatan pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Kita sudah selesai dengan diskriminasi perempuan dalam pendidikan. Sejak hampir satu abad yang lalu ketika pahlawan perempuan seperti RA Kartini, Dewi Sartika dan tokoh perempuan lainnya memperjuangkan emansipasi termasuk dalam pendidikan. Hanya diskriminasi perempuan di bidang lain masih jelas di negeri ini.

Beberapa hal yang bisa kita petik adalah: (1) keberanian mengutarakan pendapat baik melalui lisan maupun tulisan bagi perempuan, karena ini akan membawa perubahan; (2) bahwa pendidikan adalah senjata bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuannya; (3) kemampuan kerja sama/networking perempuan perlu diasah meskipun sulit karena itu akan mempermudah perempuan dalam mencapai tujuan; dan yang terakhir (4) perempuan akan selalu membawa nilai-nilai baru dalam pendidikan. □ - o

**)Dr Cahyaningsih SP MBA, Guru SMKN 3 Wonosari, alumni program doktoral Manajemen Pendidikan UNY.*



KR - JOKO SANTOSO

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tahun 1979 sudah diratifikasi 189 negara termasuk Indonesia. Realitanya, semua masih menjadi diskursus untuk diwacanakan daripada diimplementasikan.

Di Indonesia, permasalahan kesetaraan jender tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1984. Harapannya, lewat undang-undang hambatan perempuan dalam mendapatkan hak-haknya termasuk pendidikan menjadi terlindungi. Perempuan terhindar dari stereotipe jender yang merugikan perempuan untuk meraih posisi puncak dalam

TUJUH tahun silam, tepatnya 12 Juli 2013, di Sidang Majelis Umum PBB, Malala Yousafzai, menyatakan: *"Hari ini bukanlah hariku. Hari ini adalah milik setiap perempuan, setiap anak laki-laki dan setiap anak perempuan yang berani bersuara tentang hak-hak mereka"*. Ucapan disampaikan pejuang pendidikan asal Pakistan di hadapan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Presiden Majelis Umum Vuk Jeremic, utusan khusus PBB untuk pendidikan Global Gordon Brown serta 500 delegasi muda PBB.

Keberanian Malala kecil tidak datang dengan tiba-tiba. Semua bermula dari penguasaan kelompok Taliban di Swat Balley tempat kelahiran Malala. Taliban melarang perempuan bersekolah dan kegiatan budaya serta menonton televisi. September setelah Taliban menyerang sekolah perempuan di Swat, Malala memberanikan diri menyampaikan pidato pertamanya dengan judul: *"Betapa beraninya Taliban merampas hak dasarnya untuk bersekolah?"*

Sejak remaja Malala sudah sangat peduli dengan dunia pendidikan. Di usianya yang sangat belia, Malala menulis di Blog untuk BBC Urdu mengenai kehidupannya di bawah ancaman Taliban yang menolak pendidikan bagi perempuan. Tahun 2011, Malala dinominasikan sebagai penerima penghargaan Nobel Perdamaian Anak Internasional. Tragis. Satu tahun kemudian ia ditembak Taliban. Dukungan kemudian justru mengalir dari seluruh dunia dan mengantarannya sebagai peraih nobel perdamaian serta kesempatan untuk menyelesaikan studinya di Oxford University, Inggris.

Diskriminasi Jender

Kisah Malala adalah kisah salah satu bentuk diskriminasi perempuan dalam pendidikan yang terjadi di dunia. Pendidikan untuk semua (*education for all*) yang didengung-dengungkan Paulo

Dampak Pertumbuhan Ekonomi Minus

Tasroh

SEJUMLAH lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bakal terkontraksi cukup dalam, seperti terjadi di hampir semua negara di berbagai belahan dunia. Kondisi ini tak lain akibat masih belum meredanya pandemi virus korona (Covid-19).

Kendati sejumlah fasilitas publik, bisnis dan pariwisata mulai dibuka dengan label 'new normal', diperkirakan belum cukup untuk mengungkit roda perekonomian. Di sektor ritel misalnya. Kendati Pemprov DKI Jakarta sudah membuka mal sejak pekan kedua Juni lalu, di beberapa lokasi masih sepi.

Sektor ini menjadi indikasi bagaimana sektor konsumsi yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi selalu di atas 50% terhadap total produk domestik bruto (PDB). Di antara sejumlah lembaga yang merilis proyeksi terbaru pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini, hanya Bank Dunia yang seperti yang cukup optimistis. Lembaga ini memperkirakan Indonesia stagnan 0%. Sementara Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melihat outlook pertumbuhan ekonomi dalam negeri lebih suram.

Prospek Ekonomi

IMF dalam proyeksi terbarunya memperkirakan pertumbuhan di 2020 di angka -0,3%, OECD di kisaran -3,9 hingga -2,8% dan ADB -1%. Sementara pemerintah sendiri mempunyai hitungan proyeksi pertumbuhan sepanjang tahun ini terkontraksi -0,4 hingga 1%. Para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga pesimistis dengan prospek ekonomi tahun ini. Mereka memperkirakan di kuartal II/2020 perekonomian akan tumbang alias -4 sampai -6%.

Bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi risiko terburuk jika skenario pertumbuhan minus?

Dampak paling terasa di luar sektor kesehatan dan sosial adalah meredupnya realisasi investasi. Seperti tergambar dalam data BKPM (2020), realisasi investasi hanya 9% senilai Rp 172 triliun dari target yang sudah ditetapkan mencapai 785,81 triliun. Hal ini bisa terlihat dari penundaan sebanyak 189 proyek di berbagai bidang dari 652 proyek yang sudah sampai pada tahap *Letter of Intent* (LoI).

Setali tiga uangan dengan sektor dan bidang lain yang juga 75% dinyatakan 'mangkrak' dan belum ada solusi yang komprehensif untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional. Lihat misalnya, melalui Perpres No. 72/2020 yang diundangkan Kamis (25/6) lalu, secara resmi pendapatan negara dikoreksi menjadi Rp 1.699,9 triliun, turun Rp 60,8 triliun dibandingkan proyeksi sebelumnya Rp 1.760,9 triliun. Adapun pos belanja negara di masa pandemi ini membengkak jadi Rp 2.739,1 triliun, sehingga dibutuhkan pembiayaan anggaran Rp 1.039,2 triliun atau 6,34% PDB. Dengan defisit yang sedemikian besar itu, sebelumnya hanya di bawah 3%, tentu akan berimbas pada kebutuhan pencarian sumber-sumber pembiayaan, baik melalui surat utang maupun instrumen lainnya seperti investasi.

Optimis

Namun pemerintah tetap optimis merespons pertumbuhan negatif tersebut dengan berbagai terobosan kebijakan. Antara lain

bergegas kembali menjalankan kebijakan pembangunan infrastruktur yang sudah terencana dengan baik sekaligus sudah ditargetkan sumber pendanaannya. Jika proyek-proyek infrastruktur kembali digenot, diyakini setidaknya bisa mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan minus ekonomi nasional. Pada gilirannya diharapkan mampu mendorong internal pada geliat ekonomi rakyat secara keseluruhan.

Dengan skema-skema yang sudah dirancang pemerintah untuk penanganan Covid-19, kita berharap semua sektor bisa mendapat porsi yang berkeadilan, agar ekonomi kembali bergairah. Namun, harus diingat bahwa pandemi belum berakhir. Jangan sampai hanya karena fokus mengembalikannya ekonomi, sektor kesehatan malah keteteran karena grafik pandemi masih meninggi. □ - o

**)Tasroh, SS MPA MSc, Tim Pengembang Investasi Daerah dan Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan).*

Pojok KR

RS swasta di DIY terancam kolaps
*** Ini persoalan serius di tengah wabah**

Di Pekalongan cekok meningkat, istri gugat cerai
*** Keharmonisan keluarga pun terganggu Covid-19**

Pemda DIY perlu inovasi salurkan bansos
*** Kreativitas dan inovasi diperlukan di segala bidang**

Beraksi

Pikiran Pembaca
Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Pustakawan di Tengah Pandemi

TANGGAL 7 Juli diperingati sebagai Hari Pustakawan. Apakah pustakawan itu? Barangkali masyarakat awam belum banyak mengenal pustakawan sebagai profesi, layaknya mereka mengenal profesi dokter, guru, perawat atau yang lainnya. Pustakawan adalah seorang yang menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan (Kode Etik Pustakawan, 1998:1).

Dalam UU No 43 tahun 2007 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pustakawan sebagai profesi sudah tentu dituntut memiliki beragam keterampilan atau keahlian. Salah satu keterampilan tersebut adalah pustakawan memiliki kecakapan dalam menyesuaikan keadaan yang menantang. Dengan kata lain pustakawan harus memiliki kecakapan adaptif. Kini ketika dunia dihadapkan pada kondisi pandemi akibat merebaknya virus Korona jenis baru atau yang dikenal dengan Covid-19 dan sudah berjalan tiga bulan lebih itu, pustakawan sebagai profesi juga harus 'mereformasi' sikap dan perilaku menuju tatanan hidup baru atau istilah populer dengan sebutan 'new normal'. Kebiasaan perilaku dalam rupa jaga jarak, pakai masker, sering mencuci tangan, sekarang menjadi tradisi dalam setiap tindakan atau pekerjaan keseharian. Pun pelayanan yang dilakukan pustakawan dalam kaitannya sebagai penyedia jasa informasi perlu menyesuaikan diri dengan

kondisi pandemi saat ini. Seperti halnya pelayanan publik lainnya yang mengedepankan protokol kesehatan, pustakawan dalam melayani kebutuhan masyarakat juga harus mengacu aturan kesehatan tersebut.

Selain dibutuhkan perilaku adaptif demikian tidak kalah pentingnya adalah sikap pustakawan untuk selalu kreatif dan inovatif. Kini di tengah 'tsunami' informasi, ditandai makin melubernya informasi secara cepat dan tidak setiap informasi mengandung keakuratan data, peran pustakawan sangat dibutuhkan untuk membendung informasi yang tumpah ruah agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Peran proaktif pustakawan untuk ikut memberikan informasi yang akurat dan kredibel di tengah masyarakat yang sedang dilanda pandemi ini agaknya bisa menjadi media untuk mengajak masyarakat berpikir positif dalam menyikapi segala hal. Banyak pakar kesehatan berpendapat dengan pikiran positif akan meningkat imunitas tubuh sehingga kita tidak mudah terinfeksi oleh penyakit.

Sebagai penyedia jasa sekaligus pengelola informasi, pustakawan memiliki fungsi strategis untuk menangkul konten berita-berita atau informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, kini di tengah pandemi, pustakawan tidak sekadar berkutat dengan tugas pengelolaan perpustakaan yang identik dengan deretan buku-buku di rak melainkan sudah waktunya pustakawan berkontribusi menangkul serangan pandemi ini agar kehidupan sosial segera pulih kembali. □ - o

FL Agung Hartono SSos
Pustakawan di Program Pascasarjana ISI Yogya.

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurinya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumong Ritonga.
Samarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti.
Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.